

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 menyajikan tingkat pencapaian 6 sasaran dengan 11 indikator sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III. Secara umum, capaian kerjanya adalah sebagai berikut:

Capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 dari sebanyak 6 sasaran dengan 11 indikator sasaran sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	76,80	76,62	99,77
2	Meningkatnya kesesuaian bangunan dan lingkungan	2	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	100,00	100,00	100,00
3	Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak	3	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	94,71	91,69	96,81
4	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	4	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	85,65	87,14	100
		5	Persentase kawasan pemukiman kumuh	6,44	6,74	99,68
		6	Persentase rumah layak huni	86,39	87,94	100
		7	Persentase drainase lingkungan kondisi baik	78,00	77,20	98,97
5	Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah	8	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	86,71	86,28	99,50
		9	Persentase mediasi sengketa/konflik tanah	100,00	100,00	100,00
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	10	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	83,00	71,81	86,52
		11	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Capaian			1.084,79	
		Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja			98.62	

Capaian tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 30.304.045.755 dari pagu anggaran sebesar Rp. 31.053.210.006 atau persentase penyerapan anggaran sebesar 97,59%.

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain :

1. Masih terdapat penduduk yang belum mendapatkan akses air minum
2. Masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak
3. Masih tingginya angka persentase kawasan permukiman kumuh
4. Masih rendahnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain :

1. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penduduk yang belum mendapatkan akses air minum melalui Pembangunan, Perluasan dan Rehabilitasi SPAM di kawasan pedesaan
2. Upaya yang dilakukan untuk rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak melalui pembangunan tangki septic skala individual minimal 50 KK di kawasan pedesaan.
3. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan persentase kawasan kumuh melalui pembangunan jalan lingkungan, drainase lingkungan, pembangunan Tembok Penahan Tanah, Lampu Penerangan Jalan Umum di daerah yang termasuk kawasan kumuh.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dinas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan serta pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menyediakan data dan informasi mengenai capaian target dan capaian realisasi secara akuntabel secara terbuka kepada masyarakat, sehingga memberikan edukasi bahwa perangkat daerah berkerja dengan prosedur yang ditetapkan. Hasil capaian ini juga menjadi keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.

Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Melalui pendekatan ini,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mendorong Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mencapai Good Governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai kewajiban kegiatan dalam laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis;
4. Menjadikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
5. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
6. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berisikan perencanaan strategis dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang akhirnya bermuara kepada kualitas kinerja institusi pada Tahun Anggaran 2023, yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat.

1.3 DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban kinerja tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 13 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

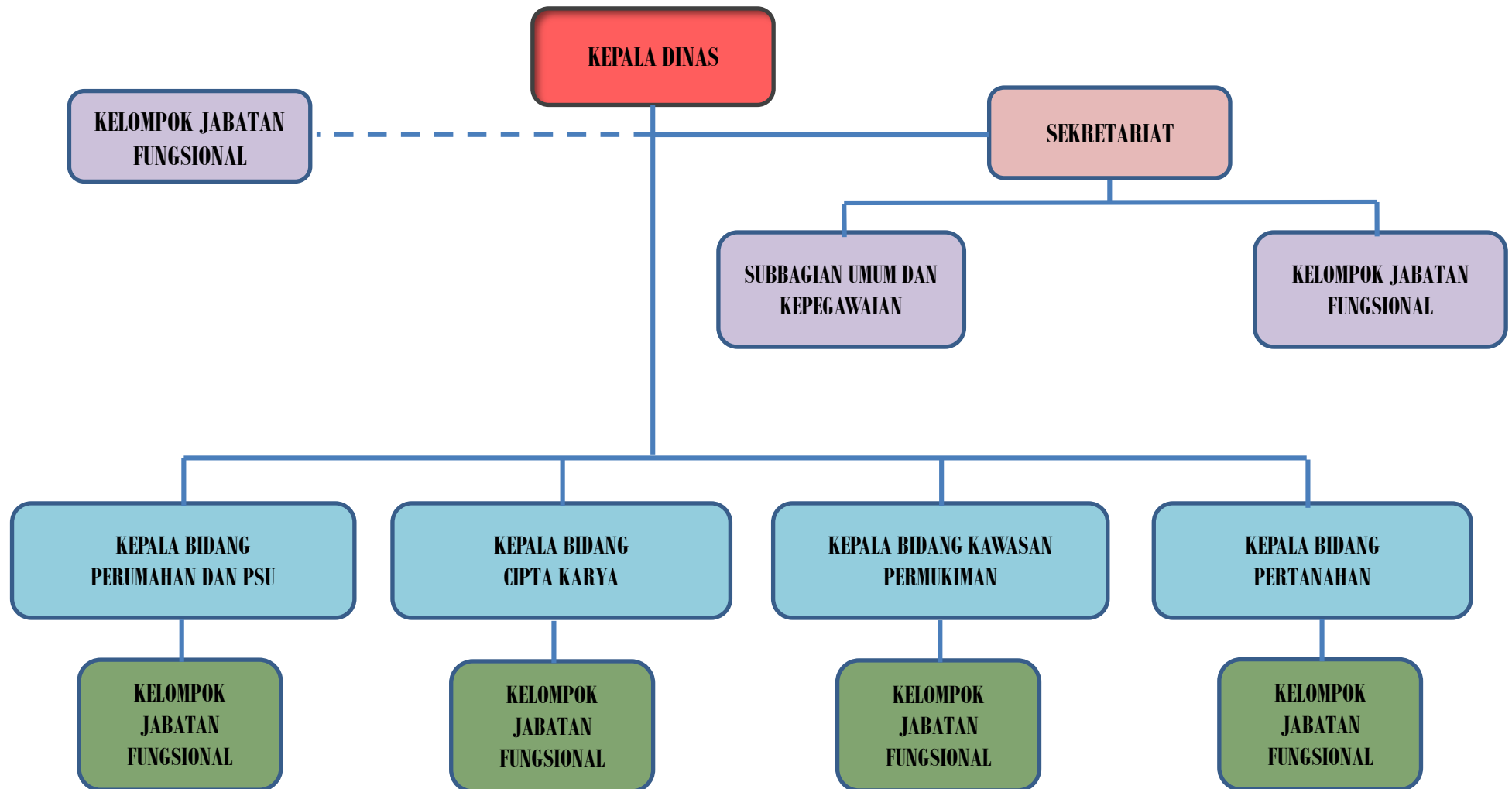
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan peraturan daerah Kabupaten Tapanuli Utara nomor 09 tahun 2016 tentang **“Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara”** dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara serta Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 13 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara yang mengemban tugas membantu Bupati Tapanuli Utara dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pendataan, Perencanaan, Penyediaan, Bantuan, Pembiayaan, Pemantauan dan Evaluasi bidang perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan permukiman, ciptakarya dan pertanian;
- b. Pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi sesuai yang ditetapkan bidang Perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), kawasan permukiman, cipta karya dan pertanian;
- c. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- d. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II-b), Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas (eselon III-a) dan 3 orang pejabat struktural eselon IV-a (Kepala Sub Bagian) dan 4 orang Kepala Bidang (eselon III-b), masing-masing Kepala Bidang tersebut dibantu 8 orang pejabat struktural Eselon IV-a (Kepala Seksi) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Perumahan dan PSU;
4. Bidang Cipta Karya;
5. Bidang Permukiman;
6. Bidang Pertanahan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Kelompok Jabatan Pelaksana.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TAPANULI UTARA**



SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah Sumber Daya Aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri dari:

1. Pejabat Eselon II A	: 1 orang (laki-laki)
2. Pejabat Eselon III A	: 1 orang (Laki-laki)
3. Pejabat Eselon III B	: 4 orang (Laki-laki dan Perempuan)
4. Pejabat Eselon IV A	: 1 orang (Perempuan)
5. Fungsional	: 7 orang (laki-laki dan Perempuan)
6. Fungsional Umum	: 22 orang (laki-laki dan Perempuan)
Jumlah	: 36 orang

Dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

- S2 : 5 Orang
- S1 : 19 Orang
- D3 : 3 Orang
- SMA : 8 Orang
- SLTP : 1 Orang

1.5 ISSU TRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan dan kondisi pembangunan prasarana dan sarana bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari permasalahan umum serta permasalahan spesifik untuk setiap sektor bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (air bersih, sanitasi, drainase lingkungan, pengembangan perumahan, permukiman dan pendataan/inventarisasi pertanahan). Pada setiap pelaksanaan kegiatan pasti tidak dapat lepas dari hambatan atau kendala, hanya yang membedakan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain adalah intensitas dari hambatan atau kendala yang dihadapi tersebut.

Dibawah ini beberapa faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sasaran Jangka menengah dari Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Implikasi RTRW dan Implikasi KLHS antara lain:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak huni
2. Rendahnya daya dukung sarpras wilayah permukiman
3. Kualitas lingkungan permukiman yang kurang memenuhi syarat
4. Masih adanya rumah tinggal yang belum bersanitasi

- 5 Kurangnya kesesuaian/ketaatan pembangunan terhadap regulasi penataan ruang yang disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan informasi penataan ruang (RTRW, RDTR dan peraturan yang lebih rinci) di ruang publik
- 6 Belum semua rumah tangga terlayani air bersih

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penyusunan laporan kinerja dan landasan hukum penyusunan laporan kinerja serta tugas, fungsi, peran strategis dan isu strategis perangkat daerah dalam mewujudkan visi misi pemerintah daerah.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang Rencana Strategis 2019-2024 yang memuat visi misi pemerintah daerah, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Perjanjian Kinerja yang memuat Indikator Kinerja Utama perangkat daerah dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang Capaian Kinerja yang memuat tentang analisis capaian IKU tahun 2022 dan analisis kinerja per sasaran kinerja yang telah diperjanjikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022. Mengemukakan faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja atau factor kegagalan dan solusi meningkatkan kinerja apabila tidak memenuhi target kinerja dan Realisasi Anggaran.

BAB IV : PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2019-2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima tahunan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada, Renstra OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk kurun waktu lima tahun 2019-2024.

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang.

Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor- faktor kunci keberhasilan.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli

Utara Tahun 2019-2024, bahwa Visi Kabupaten Tapanuli Utara adalah **“Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan Dan Lumbung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Serta Daerah Tujuan Wisata”**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024, Misi Kabupaten Tapanuli Utara yang berkaitan langsung dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara adalah Misi Ke-6 (enam) **“Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup”**

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang lebih spesifik dan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif. Tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan visi misi Pemerintah Daerah, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misi tersebut.

Dengan mengacu pada visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024, Misi pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang berkaitan langsung dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli utara adalah Misi ke 6 (enam) **“Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup”**. Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang ditetapkan menjadi tugas dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak

Dengan sasaran:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak

2. Meningkatnya kesesuaian bangunan dan lingkungan
3. Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan /permukiman layak
4. Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas
5. Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam hal ini, tujuan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli adalah:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak
2. Meningkatnya kesesuaian bangunan dan lingkungan
3. Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan /permukiman layak
4. Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas
5. Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum
2. Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK
3. Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak
4. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU

5. Persentase kawasan pemukiman kumuh
6. Persentase rumah layak huni
7. Persentase drainase lingkungan kondisi baik
8. Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum
9. Persentase mediasi sengketa/konflik tanah
10. Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat
11. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum
			Meningkatnya kesesuaian bangunan dan lingkungan	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK
			Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan /permukiman layak	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak
			Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU
				Persentase kawasan pemukiman kumuh
				Persentase rumah layak huni
				Persentase drainase lingkungan kondisi baik
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan	Persentase Layanan Pertanahan	Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum
				Persentase mediasi sengketa/konflik tanah

2.2 RENCANA KINERJA

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja yang merupakan komitmen dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicator*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJMD atau Renstra. Reviu IKU diperlukan karena adanya evaluasi RPJMD, evaluasi renstra perangkat daerah dan terdapatnya pembentukan perangkat daerah baru. IKU ditetapkan mengikuti periode dokumen perencanaan (5 tahun). Bagian Organisasi telah menyusun IKU pada tahun 2023, sehingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan Indikator.

Tabel 2.2 Formulasi Indikator Kinerja Utama Dinas PerumahanDan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara

NO	SASARAN RPJMD YANG DIACU	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	Jumlah rumah tangga mendapat akses air minum x 100%	Bidang Ciptakarya	Laporan Triwulanan	Jumlah rumah tinggal mendapat akses air minum
				Jumlah rumah tangga			Jumlah rumah tinggal
		Meningkatnya kesesuaian bangunan dan lingkungan	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	Jumlah bangunan pemerintah yang dibangun x 100%	Bidang Ciptakarya	Laporan Triwulanan	Jumlah bangunan pemerintah yang dibangun
				Jumlah bangunan pemerintah yang dibangun sesuai dengan NSPK			Jumlah bangunan pemerintah yang dibangun sesuai dengan NSPK
		Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Jumlah rumah tangga berakses sanitasi x 100%	Bidang Ciptakarya	Laporan Triwulanan	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi
				Jumlah rumah tangga			Jumlah rumah tinggal
		Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	Luas lingkungan perumahan /permukiman yang sehat dan aman yang didukung PSU x 100%	Bidang Permukiman	Laporan Triwulanan	Luas lingkungan perumahan/ permukiman yang sehat dan aman yang didukung PSU
				Luas lingkungan perumahan/ permukiman			Luas lingkungan perumahan/ permukiman
		Persentase kawasan pemukiman kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh x 100%	Luas Kawasan Permukiman	Bidang Pengembangan Perumahan	Laporan Triwulanan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh
				Luas Kawasan Permukiman			Luas Kawasan Permukiman
		Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah tinggal layak huni x 100%	Jumlah rumah tinggal	Bidang Pengembangan Perumahan	Laporan Triwulanan	Jumlah rumah tinggal layak huni
				Jumlah rumah tinggal			Jumlah rumah tinggal
		Persentase drainase lingkungan kondisi baik	Panjang drainase lingkungan kondisi baik x 100%	Panjang drainase lingkungan	Bidang Ciptakarya	Laporan Triwulanan	Panjang drainase lingkungan kondisi baik
				Panjang drainase lingkungan			Panjang drainase lingkungan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Nilai AKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Luas tanah yang dilakukan ganti kerugian dan santunan tanah x 100%	Bidang Pertanahan	Laporan Triwulanan	Luas tanah yang dilakukan ganti kerugian dan santunan tanah
				Luas Pengadaan Tanah			Luas Pengadaan Tanah
			Persentase mediasi sengketa/konflik tanah	Jumlah sengketa /konflik tanah yang dimediasi x 100%	Bidang Pertanahan	Laporan Triwulanan	Jumlah sengketa /konflik tanah yang dimediasi
				Jumlah pengaduan sengketa/ konflik tanah yang masuk			Jumlah pengaduan sengketa/ konflik tanah yang masuk
			Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Semua Bidang	Laporan Triwulanan	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat
			Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK/Inspektorat x 100%	Semua Bidang	Laporan Triwulanan	Jumlah temuan BPK/ Inspektorat
				Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti			Jumlah temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, maka ditentukan beberapa sasaran strategis dan Indikator Sasaran Strategis seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Formulasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	Jumlah rumah tangga mendapat akses air minum x 100%
			Meningkatnya kesesuaian bangunan dan lingkungan	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	Jumlah bangunan pemerintah yang dibangun x 100%
			Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Jumlah rumah tangga berakses sanitasi x 100%
			Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	Luas lingkungan perumahan /permukiman yang sehat dan aman yang didukung PSU x 100%
				Persentase kawasan permukiman kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh x 100%
				Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah tinggal layak huni x 100%
				Persentase drainase lingkungan kondisi baik	Panjang drainase lingkungan kondisi baik x 100%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan	Persentase Layanan Pertanahan	Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Luas tanah yang dilakukan ganti kerugian dan santunan tanah x 100%
					Luas Pengadaan Tanah
				Persentase mediasi sengketa/konflik tanah	Jumlah sengketa /konflik tanah yang dimediasi x 100%
					Jumlah pengaduan sengketa/konflik tanah yang masuk

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai

pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Tapanuli Utara sebagai pemberi amanah dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Tapanuli Utara dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi Bupati Tapanuli Utara untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pengantian atau mutasi pejabat dikarenakan:

- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.4 PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2023 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	Persen	76,80
2	Meningkatnya kesesuaian bangunan dan lingkungan	1	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	Persen	100,00
3	Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak	1	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Persen	94,71
4	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	1	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	Persen	85,65
		2	Persentase kawasan pemukiman kumuh	Persen	6,44
		3	Persentase rumah layak huni	Persen	86,39
		4	Persentase drainase lingkungan kondisi baik	Persen	78,00
5	Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah	1	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persen	86,71
		2	Persentase mediasi sengketa/konflik tanah	Persen	100,00
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Nilai	83,00
		2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00

Tabel 2.5 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	Persen	76,80
2	Meningkatnya kesesuaian bangunan dan lingkungan	1	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	Persen	100,00
3	Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak	1	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Persen	94,71
4	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	1	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	Persen	85,65
		2	Persentase kawasan pemukiman kumuh	Persen	6,44
		3	Persentase rumah layak huni	Persen	86,39
		4	Persentase drainase lingkungan kondisi baik	Persen	78,00
5	Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah	1	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persen	86,71
		2	Persentase mediasi sengketa/konflik tanah	Persen	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Nilai	83,00
		2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00

Dari perbandingan tabel perjanjian kinerja murni tahun 2023 dengan tabel perjanjian kinerja perubahan tahun 2023 bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan yang mengakibatkan perubahan target kinerja akibat dari perubahan anggaran pada APBD 2023, dikarenakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya mendapatkan penambahan sebesar Rp. 300.000.000 pada P-Apbd 2023 atau hanya sekitar 1,47% dari anggaran semula.

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap Indikator Kinerja yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program seperti pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Program
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2	Meningkatnya kesesuaian bangunan dan lingkungan	1	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	Program Penataan Bangunan Gedung
3	Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/ permukiman layak	1	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	1	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
		2	Persentase kawasan pemukiman kumuh	Program Kawasan Permukiman
		3	Persentase rumah layak huni	Program Kawasan Permukiman
		4	Persentase drainase lingkungan kondisi baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
5	Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan	1	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Program Penatagunaan Tanah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Program
(1)	(2)	(3)		(4)
	mediasi sengketa/konflik tanah	2	Persentase mediasi sengketa/konflik tanah	Program Penatagunaan Tanah
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja tahun 2022.

Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran yang diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dilakukan melalui realisasi kinerja dibandingkan dengan target kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Perjanjian kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun tersebut.
2. Pengumpulan data kinerja dilakukan berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.

Metode/cara pengukuran kinerja dengan melakukan perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja

(*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja yakni:

1. Indikator bermakna positif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, digunakan dengan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, digunakan dengan rumus:

- a. yang satuan indikatornya dalam persen (%)

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\%$$

- b. satuan indikatornya bukan dalam persen (%)

$$\text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa capaian atas realisasi kinerja dikelompokkan dalam interval dan kriteria sebagaimana tabel berikut:

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
91 % ≤ 100 %	Sangat tinggi	Biru
76 % ≤ 90 %	Tinggi	Hijau
66 % ≤ 75 %	Sedang	Kuning
51 % ≤ 65 %	Rendah	Coklat
≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara telah ditetapkan 6 (enam) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 4 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Akuntablittas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi

untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan Analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis terhadap baseline serta akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga dengan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	Persen	76,80	76,62	99,77
2	Meningkatnya kesesuaian bangunan dan lingkungan	1	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	Persen	100,00	100,00	100,00
3	Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak	1	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Persen	94,71	91,69	96,81
4	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	1	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	Persen	85,65	87,14	100,00
		2	Persentase kawasan pemukiman kumuh	Persen	6,44	6,74	99,68
		3	Persentase rumah layak huni	Persen	86,39	87,94	100,00
		4	Persentase drainase lingkungan kondisi baik	Persen	78,00	77,20	98,97

5	Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah	1	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persen	86,71	86,28	99,50
		2	Persentase mediasi sengketa/konflik tanah	Persen	100,00	100,00	100,00
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Nilai	83,00	71,81	86,52
		2	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 6 (enam) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak diukur melalui indikator Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum dengan capaian kinerja sebesar 99,77 % (tidak capai target) dikarenakan kurangnya anggaran yang bersumber dari Dana aliran Khusus fisik pada tahun anggaran 2023. Untuk mencapai sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan kesesuaian bangunan dan lingkungan, telah menetapkan indikator Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK dengan capaian kinerja 100% (terlampau).

Pada sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatkan kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak dengan indikator Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dengan capaian kinerja 96,81 (tidak capai target) dikarenakan kurangnya bantuan anggaran yang bersumber dari Dana aliran Khusus fisik pada tahun anggaran 2023.

Untuk sasaran strategis keempat yaitu Meningkatkan lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas diukur melalui 4 (empat) indikator : pertama Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU dengan capaian kinerja 100% (terlampau) , kedua Persentase kawasan permukiman kumuh dengan capaian kinerja 6,74% (tidak capai target) dikarenakan pembangunan yang dilaksanakan tidak melihat dari SK kumuh, ketiga Persentase rumah layak huni dengan capaian kinerja 100% (terlampau) dan yang keempat Persentase drainase lingkungan kondisi baik dengan capaian kinerja 98,97 (tidak capai target) dikarenakan adanya refocusing anggaran dan kegiatan pada tahun anggaran 2023.

Sasaran Strategis kelima yaitu Meningkatkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah yang diukur melalui 2 indikator kinerja yaitu Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum dengan capaian kinerja 99,50% (tidak terlampau) diakibatkan adanya keterbatasan anggaran sehingga tidak adanya kegiatan pengadaan lahan untuk kepentingan umum

dan indikator kinerja kedua yaitu Persentase mediasi sengketa/konflik tanah dengan capaian kinerja 100% (sudah capai target)

Dengan melihat 11 (sebelas) indikator untuk mengukur 6 sasaran strategis dimana tidak seluruh indikator tercapai/terlampau dikarenakan keterbatasan anggaran yang diberikan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan secara optimal.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara realisasi dan target indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak

Sasaran Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak merupakan upaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menjadikan perumahan/permukiman memiliki akses terhadap air minum yang aman dan layak. Sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja kategori tidak mencapai target. Analisis capaian kinerja tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja		Satuan	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
					(%)
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	Persen	76,80	76,62	99,77

Dengan melihat tabel dan perhitungan diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 76,80 sementara realisasi sebesar 76,62 maka capaian kinerja tahun 2023 atas indikator Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum sebesar 99,77 atau tidak mencapai target yang ditetapkan hal ini diakibatkan karena berkurangnya bantuan dana yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik untuk kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.

Tabel di atas Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang merupakan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum dengan memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan, mata air dan sumur bor. Sistem yang digunakan adalah melalui pemasangan pipa air secara gravitasi dan pemasangan pompa air.

Untuk melihat perbandingan capaian tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja		Satuan	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
					(%)			(%)			(%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	Persen	74,5	74,47	99,96	75,6	75,96	100,48	76,8	76,62	99,77

Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target	Realisasi			Capaian
				2024	2021	2022	2023	(%)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	Persen	77,8	74,47	75,96	76,62	98,48

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai 76,62 %. Dibanding dengan target renstra sebesar 77,8 di tahun 2024 maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman harus dapat meningkatkan kinerja agar dapat memenuhi target.

Pencapaian indikator Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum pada tahun 2023 ini didukung oleh indikator capaian program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM sebagaimana tabel berikut :

Tabel Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja

Program	Satuan	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Capaian
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persen	76,8	76,62	99,77

Melalui program tersebut dapat dicapai kinerja pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum sebanyak 6 unit dan melakukan rehabilitasi jaringan air bersih sebanyak 5 unit selama tahun 2023, Adapun capaian untuk program ini tidak mencapai target hal dikarenakan berkurangnya dana yang bersumber dari DAK (Dana

Alokasi Khusus) untuk kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan. Adapun solusi yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi vertikal dalam hal ini kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan melengkapi RC (Readness Criteria) maupun dokumen teknis yang menjadi syarat yang akan digunakan untuk penyampaian usulan penambahan Dana Alokasi Khusus fisik.



Foto dokumentasi Pelaksanaan kegiatan pemenuhan akses air minum

Sasaran 2

Meningkatnya kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan

Sasaran **Meningkatnya kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan** merupakan upaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menata bangunan Gedung dan lingkungan melalui mekanisme pembangunan Gedung yang sesuai dengan peraturan. Sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja kategori sesuai target. Analisis capaian kinerja tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja		Satuan	2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	Persen	100	100	100,00

Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK merupakan upaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menata bangunan gedung dan lingkungan melalui mekanisme pembangunan gedung yang sesuai dengan peraturan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Untuk melihat perbandingan capaian tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023
-------------------	--------	------	------	------

			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
					(%)			(%)			(%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target	Realisasi			Capaian
				2024	2021	2022	2023	%
2	Meningkatnya kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100

Jika melihat tabel di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK selalu mencapai target dari tahun ke tahun yaitu sebesar 100% dengan demikian capaian kinerja pada target akhir renstra akan tercapai jika Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempertahankan capaian kinerjanya.

Pencapaian indikator Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK pada tahun 2023 ini didukung oleh indikator capaian Program Penataan Bangunan Gedung sebagaimana tabel berikut :

Tabel Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja :

Program	Satuan	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Capaian
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persen	100	100	100

Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK dengan target 100% dapat direalisasikan 100%. Hal ini dicapai melalui Program Penataan Bangunan Gedung dengan Kegiatan Rehabilitasi sekolah/gedung kantor/polindes/rumah dinas sebanyak 5 unit, kegiatan pembangunan Rumah Singgah pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, Pembangunan Gudang

Logistik pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara dan melakukan Penataan Halaman Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara.



Foto Pembangunan Rumah Singgah pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara



Foto Penataan Halaman Kantor Dinas Perkim Taput



Pembangunan Gudang Logistik pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara



Rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRD Kab Taput

Sasaran 3

Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak

Sasaran Meningkatkan kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak merupakan upaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menjadikan perumahan/permukiman memiliki akses sanitasi yang layak. Sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja kategori tidak mencapai target. Analisis capaian kinerja tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja		Satuan	2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Persen	94,71	91,69	96,81

Dengan melihat tabel dan perhitungan diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 94,71% sementara realisasi sebesar 91,69% maka capaian kinerja tahun 2023 atas indikator Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak sebesar 96,81 atau tidak mencapai target yang ditetapkan hal ini diakibatkan karena berkurangnya dana yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik untuk kegiatan sanitasi di kawasan perdesaan.

Untuk melihat perbandingan capaian tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja		Satuan	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
					(%)			(%)			(%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Persen	92,71	89,21	96,22	93,71	90,27	96,33	94,71	91,69	96,81

Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target	Realisasi			Capaian
				2024	2021	2022	2023	
3	Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/ permukiman layak	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Persen	95,71	89,21	90,27	91,69	95,80

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai 91,69%. Dibanding dengan target renstra tahun 2024 sebesar 95,71% di tahun 2024 maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman harus dapat meningkatkan kinerja agar dapat memenuhi target di akhir renstra 2024.

Pencapaian indikator Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak pada tahun 2023 ini didukung oleh indikator capaian program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebagaimana tabel berikut :

Program	Satuan	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Capaian
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persen	94,71	91,69	96,81

Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak adalah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman yang sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layacnan fasilitas air bersih, pembuangan air besar/tinja dan pembuangan air limbah. Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dengan target 94,71% dapat direalisasikan sebesar 91,69% melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Hal ini dicapai dengan kegiatan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK sebanyak 1.000 unit yang tersebar di 20 desa.



Foto Dokumentasi Pembangunan Tangki Septik Skala Individual

Sasaran 4

Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana, sarana dan utilitas

Sasaran Meningkatkan lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana, sarana dan utilitas merupakan upaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menjadikan perumahan/permukiman bebas kawasan kumuh sehingga terwujud permukiman layak huni dan berkelanjutan. Sasaran ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan 2 (dua) indikator kinerja melebihi

target dan 2 (dua) indikator kinerja tidak mencapai target. Analisis capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

1. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU

Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU adalah Lingkungan permukiman yang sudah difasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU). Adapun capaian indikator kinerja tahun 2023 sebagaimana tabel berikut

Indikator Kinerja		Satuan	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
					(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	Persen	85,65	87,14	100

Dengan melihat tabel dan perhitungan diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 85,65% sementara realisasi sebesar 87,14 % maka capaian kinerja tahun 2023 atas indikator Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU sebesar 100 % atau telah mencapai target yang ditetapkan.

Untuk melihat perbandingan capaian tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja		Satuan	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
					(%)			(%)			(%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	Persen	83,5	82,89	99,27	84,6	84,89	100	85,65	87,14	100

Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target	Realisasi			Capaian
				2024	2021	2022	2023	
4	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	Persen	86,7	82,89	84,89	87,14	100

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai 87,14%. Dibanding dengan target renstra tahun 2024 sebesar 86,70% di tahun 2024 maka target di akhir Renstra 2024 sudah tercapai.

Pencapaian indikator Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak pada tahun 2023 ini didukung oleh indikator capaian program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebagaimana tabel berikut :

Program	Satuan	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Capaian
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persen	85,65	87,14	100

Peningkatan PSU Perumahan dan Permukiman melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan membangun 2.376 meter jalan lingkungan, 1.108,5 meter drainase lingkungan, 175,15 meter , Tembok Penahan Tanah, 2.851,79 m2 Penataan Taman, 114 titik Pembangunan LPJU, 9 titik Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Kota (LPJK).. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU dicapai karena adanya tambahan anggaran yang diperoleh melalui Dana Bagi Hasil (DBH) pada PAPBD TA. 2023 dan adanya program PISEW dari Kementerian PUPR di 8 (delapan) desa.



Foto dokumentasi pembangunan jalan lingkungan Foto dokumentasi pembangunan Tembok Penahan Tanah

2. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh

Persentase kawasan pemukiman kumuh adalah Kawasan permukiman pada lokasi yang masuk kategori kumuh sesuai dengan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 503 Tahun 2016, dimana terdapat 21 Desa/Kelurahan yang masuk dalam kategori Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh. Adapun capaian untuk indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja		Satuan	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
					(%)
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)
2	Persentase kawasan pemukiman kumuh	Persen	6,44	6,74	99,68

Dengan melihat tabel dan perhitungan diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 6,44 % sementara realisasi sebesar 6,74 %. Adapun indikator ini merupakan Indikator bermakna negatif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya maka capaian kinerja tahun 2023 atas indikator Persentase kawasan pemukiman kumuh sebesar 99,68 % atau belum mencapai target yang ditetapkan.

Untuk melihat perbandingan capaian tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja		Satuan	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
					(%)			(%)			(%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2	Persentase kawasan pemukiman kumuh	Persen	7,44	7,38	100	6,94	7,02	99,91	6,44	6,74	99,68

Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target	Realisasi			Capaian
				2024	2021	2022	2023	
2	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	Persentase kawasan pemukiman kumuh	Persen	5,94	7,38	7,02	6,74	93,99

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase kawasan pemukiman kumuh sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai 6,74 %. Dibanding dengan target renstra tahun 2024 sebesar 5,94 % di tahun 2024 maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman harus dapat meningkatkan kinerja agar dapat memenuhi target.

Pencapaian indikator Persentase kawasan pemukiman kumuh pada tahun 2023 ini didukung oleh indikator capaian program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dan program Kawasan Permukiman sebagaimana tabel berikut :

Program	Satuan	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Capaian
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persen	85,65	87,14	100
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persen	6,44	6,74	99,68

Persentase kawasan permukiman kumuh dengan target 6,44% hanya dapat direalisasikan 6,74 %. Hal ini dicapai melalui Program Peningkatan PSU dan Program Kawasan Permukiman dengan kegiatan Penataan Lingkungan Kawasan permukiman dengan membangun 2.376 meter jalan lingkungan, 1.108,5 meter drainase lingkungan, 175,15 meter Tembok Penahan Tanah, 114 titik Pembangunan LPJU, 9 titik Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Kota (LPJK).

Tidak tercapainya target tersebut di atas dikarenakan pembangunan/rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum tidak berfokus pada penataan lokasi kawasan kumuh sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 630 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 503 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tapanuli Utara. Sementara peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni difokuskan pada lokasi kawasan permukiman kumuh. Sehingga peningkatan kawasan permukiman kumuh tidak sepenuhnya diikuti dengan peningkatan sarana, prasarana dan utilitas umumnya.

3. Persentase Rumah Layak Huni

Persentase Rumah Layak Huni adalah persentase yang menunjukkan keadaan rumah layak huni yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan para penghuninya. Persyaratan tersebut salah satunya adalah faktor keamanan konstruksi seperti bagian atap harus memiliki kemiringan yang disesuaikan dengan bahan penutup yang digunakan sehingga tidak mengakibatkan kebocoran. Bagian lantai harus terbuat dari material yang mudah dibersihkan, tidak lembab serta kuat menahan beban yang akan timbul. Pada bagian dinding harus dapat memikul beban di atasnya dan juga beban angin. Adapun untuk capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja		Satuan	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
					(%)
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)

Indikator Kinerja		Satuan	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
					(%)
3	Persentase rumah layak huni	Persen	86,39	87,95	100

Dengan melihat tabel dan perhitungan diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 86,39 % sementara realisasi sebesar 87,95 % atas indikator Persentase rumah layak huni sebesar 100 % atau telah mencapai target yang ditetapkan.

Untuk melihat perbandingan capaian tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja		Satuan	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
					(%)			(%)			(%)
1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	84,37	86,7	100	85,38	87,6	100	86,39	87,95	100

Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target	Realisasi			Capaian
				2024	2021	2022	2023	
4	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	Persentase rumah layak huni	Persen	87,4	86,70	87,60	87,95	100

Jika melihat tabel diatas, capaian Persentase Rumah Layak Huni sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai 87,95%, jika dibanding dengan target renstra tahun 2024 sebesar 87,40 % di tahun 2024 maka target di akhir Renstra 2024 sudah tercapai.

Pencapaian indikator Persentase Rumah Layak Huni layak pada tahun 2023 ini didukung oleh indikator capaian Program Pengembangan Perumahan dan Program Kawasan Permukiman sebagaimana tabel berikut :

Program	Satuan	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Capaian
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persen	6,44	6,74	99,68

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persen	86,39	87,95	100
--------------------------------	--------	-------	-------	-----

Persentase rumah layak huni dengan target 86,39 %, dapat direalisasikan 87,95 % melalui Program Kawasan Permukiman dan Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan Bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan untuk RTLH sebanyak 1.281 unit, dari provinsi Sumatera Utara sebanyak 50 unit dan dari Anggaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 17 Unit sehingga total bantuan untuk RTLH sebanyak 1.358 unit. Indikator ini selalu mencapai target setiap tahun karena Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terbanyak mendapatkan bantuan peningkatan RTLH baik dari Kementerian PU Dirjen Perumahan maupun dari Provinsi Sumatera Utara.



Rumah tidak layak huni sebelum dilakukan Peningkatan Kualitas Rumah



Rumah Layak huni setelah dilakukan Peningkatan Kualitas Rumah

4. Persentase Drainase Lingkungan Kondisi baik

Persentase drainase lingkungan kondisi baik adalah upaya mengelola air kelebihan dengan cara meresapkan sebanyak-banyaknya air ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan air ke sungai dengan tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya. Adapun capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja		Satuan	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
					(%)
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)
4	Persentase drainase lingkungan kondisi baik	Persen	78,00	77,20	98,97

Dengan melihat tabel dan perhitungan diatas bahwa target tahun 2023 sebesar 78,00 % sementara realisasi sebesar 77,20 %, maka capaian kinerja tahun 2023 atas indikator Persentase drainase lingkungan kondisi baik sebesar 98,97 atau tidak mencapai target yang ditetapkan.

Untuk melihat perbandingan capaian tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja		Satuan	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
					(%)			(%)			(%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Persentase drainase lingkungan kondisi baik	Persen	74	74,6	100	76	75,8	99,74	78	77,2	98,97

Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target	Realisasi			Capaian
				2024	2021	2022	2023	
4	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	Persentase drainase lingkungan kondisi baik	Persen	80	74,60	75,80	77,20	96,5

Jika melihat tabel diatas, capaian Persentase drainase lingkungan kondisi baik sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai 77,20%, jika dibanding dengan target renstra tahun 2024 sebesar 80,00 % di tahun 2024 maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara harus meningkatkan kinerja agar target indikator ini dapat tercapai .

Pencapaian indikator Persentase drainase lingkungan kondisi baik pada tahun 2023 ini didukung oleh indikator capaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase sebagaimana tabel berikut :

Program	Satuan	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Capaian
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persen	78	77,2	98,97

Melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan target 78% dapat direalisasikan sebesar 77,20%.dengan pembangunan drainase sepanjang 1.108 meter. Pencapaian indikator kinerja ini belum sepenuhnya memenuhi target, namun jika ditinjau dari adanya refocusing baik dalam hal kegiatan maupun anggaran pencapaian ini sudah cukup baik dengan tingkat capaian sebesar 98%



Dokumentasi Pembangunan Drainase Lingkungan

Sasaran 5

Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah

Sasaran Meningkatkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah merupakan upaya untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara melalui mediasi yang difasilitasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara. Sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator. Analisis capaian kinerja tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja		Satuan	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
					(%)
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persen	87,66	86,28	98,43
2	Persentase mediasi sengketa/konflik tanah	Persen	100	100	100,00

Dengan melihat tabel dan perhitungan diatas bahwa target tahun 2023 untuk indikator kinerja Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum tidak tercapai dikarenakan tidak ada kegiatan pengadaan lahan untuk kepentingan umum pada tahun 2023 namun untuk indikator Persentase mediasi sengketa/konflik tanah tercapai sesuai target yaitu sebesar 100 % .

Untuk melihat perbandingan capaian tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja		Satuan	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
					(%)			(%)			(%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persen	84,81	86,27	100	85,76	86,28	100	87,66	86,28	98,43
2	Persentase mediasi sengketa/konflik tanah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target	Realisasi			Capaian
				2024	2021	2022	2023	
5	Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persen	87,66	86,27	86,28	86,28	98,43
		Persentase mediasi sengketa/konflik tanah	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100

Jika melihat tabel diatas, angka capaian Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum tahun 2022 dan tahun 2023 sama yaitu sebesar 86,28%, hal ini diakibatkan karena tidak ada kegiatan pengadaan lahan untuk kepentingan umum tahun 2023 sehingga angka capaian stagnan pada angka 86,28%. jika dibanding dengan target renstra tahun 2024 sebesar 87,66 % di tahun 2024 maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara harus meningkatkan kinerja agar target indikator ini dapat tercapai sedangkan untuk indikator Persentase mediasi sengketa/konflik tanah selalu mencapai target dari tahun ke tahun sesuai dengan target yang ditetapkan pada renstra 2024.

Pencapaian indikator Persentase Persentase mediasi sengketa/konflik tanah pada tahun 2023 ini didukung oleh indikator capaian Program Penatagunaan Tanah sebagaimana dilihat pada tabel berikut:

Program	Satuan	Target tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Capaian
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persen	100	100	100

Melalui program penatagunaan tanah di tahun 2023 pelayanan mediasi sengketa/konflik tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan adanya surat permohonan mediasi dari

masyarakat yang sedang bersengketa. Persentase mediasi sengketa/konflik tanah dengan target 100 % dapat direalisasikan 100 %. Hal ini dicapai berdasarkan terlaksananya mediasi sengketa/konflik tanah di beberapa kecamatan antara lain: Mediasi sengketa/Konflik Tanah di Kecamatan Sipahutar 4 kegiatan, Mediasi sengketa/Konflik Tanah di Kecamatan Sipoholon 1 kegiatan, Mediasi sengketa/Konflik Tanah di Kecamatan Pangaribuan 2 kegiatan, Mediasi sengketa/Konflik Tanah di Kecamatan Pahae Jae 4 kegiatan. Hal ini membuktikan bahwa setiap usulan permohonan masyarakat yang masuk mengenai sengketa tanah akan selalu ditangani oleh Bidang Pertanahan lewat jalur mediasi.



Foto Dokumentasi Mediasi Sengketa/Konflik tanah

Sasaran 6

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Dalam pemenuhan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara berupaya untuk meningkatkan nilai akuntabilitas ini dengan melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Inspektorat dan Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara. Sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja		Satuan	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Satuan	80	70,69	88,36	82	71.81	86,21*	83	71,81*	86,21*
2	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00

* Angka perhitungan sementara

Capaian kinerja sasaran ini pada tahun 2023 adalah 86,21% dengan kategori capaian tinggi. Realisasi tahun 2023 untuk indikator kinerja nilai hasil evaluasi AKIP merupakan angka perhitungan sementara (capaian kinerja tahun 2022) karena realisasi indikator tersebut salah satunya adalah penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara. Sementara untuk indikator persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dengan target 100%, realisasinya dapat dicapai sebesar 100%. Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah (LAKIP) dan Ikhtisar Realisasi Kerja OPD dan Pembuatan Laporan Evaluasi RENJA dan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

3.3 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Tapanuli Utara menjalankan berbagai program dan kegiatan dengan berkoordinasi baik instansi vertikal dalam hal ini kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan instansi terkait di kabupaten Tapanuli Utara, maka dalam hal ini akan diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran). Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan total realisasi anggaran belanja dengan total realisasi anggaran belanja.

$$\text{EFISIENSI} = \frac{\text{RENCANA} - (\text{REALISASI} - \text{RENCANA})}{\text{RENCANA}} \times 100 \%$$

Dalam rumus di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud output adalah realisasi anggaran belanja langsung (target). Berikut adalah kriteria kinerja keuangan (Efisiensi)

Tabel Kriteria Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Di bawah dari 60%	Sangat Efisien

Tabel 3.2 Alokasi dan Realisasi serta Tingkat Efisiensi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Nominal	(%)		
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	3.087.241.631,00	3.053.329.182,92	98,90	99,77	1,10
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.087.241.631,00	3.053.329.182,92	98,90	99,77	1,10
2	Meningkatnya kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan	1.488.433.100,00	1.472.598.110,00	98,94	100	1,06
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.488.433.100,00	1.472.598.110,00	98,94	100	1,06
3	Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/ permukiman layak	7.132.397.600,00	7.120.719.812,00	99,84	91,69	0,16
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.132.397.600,00	7.120.719.812,00	99,84	91,69	0,16
4	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	7.436.722.910,00	6.964.180.086,00	93,65		6,35
	a. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.276.784.410,00	5.905.827.235,00	94,09	101,74	5,91
	b. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	536.999.800,00	438.368.021,00	81,63	99,68	18,37
	c. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	87.999.800,00	86.709.500,00	98,53	101,79	1,47
	d. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	534.938.900,00	533.275.330,00	99,69	98,97	0,31
5	Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah	176.897.400,00	169.978.700,00	96,09	100%	3,91
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	176.897.400,00	169.978.700,00	96,09	100%	3,91
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.731.517.365,00	11.324.364.346,00	96,53	96,53	3,47

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan, dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Sebelum Perubahan senilai Rp. 29.934.740.636,- dan Setelah Perubahan senilai Rp.31.053.210.006,- dengan realisasi anggaran senilai Rp. 30.094.599.857,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,91 % dan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) senilai Rp.958.610.148,- seperti dijelaskan pada tabel berikut;

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.000.000,-	30.000.000,-	,-	
5.1	BELANJA OPERASI	25.907.979.936,-	26.294.019.206,-	386.039.270,-	1,47
5.2	BELANJA MODAL	4.026.760.700,-	4.759.190.800,-	732.430.100,-	15,39

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut;

Anggaran Pagu per Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Realisasi Tahun Anggaran 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.087.241.631,00	3.040.948.800,92	98,50
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.087.241.631,00	3.040.948.800,92	98,50
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.213.736.133,00	1.201.047.250,00	98,95
Biaya Penunjang DAK AIR MINUM	68.086.000,00	60.860.950,00	89,39

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Pembangunan Sumur Bor di SDN 177030 Parrongitan Kec. Tarutung	57.789.800,00	57.345.800,00	99,23
Pembangunan Jaringan Air Minum di Desa Silangkitang Kec. Pahae Jae	496.954.701,00	494.169.500,00	99,44
Pembangunan Jaringan Air Minum Desa Tampilan Nauli II Kec. Sipahutar	146.954.800,00	146.769.450,00	99,87
Pembangunan Jaringan Air Minum di Dusun Simargalung Desa Hutatinggi Kec. Parmonangan	96.995.900,00	96.659.450,00	99,65
Pembangunan Pipanisasi di Pengembangan Kawasan Wisata Salib Kasih Kec. Siatas Barita	196.954.932,00	196.467.050,00	99,75
Pembangunan Jaringan Air Minum di Dusun Husor Lumban Ratus Desa Pansur Napitu Kecamatan Siatasbarita	150.000.000,00	148.775.050,00	99,18
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.823.505.698,00	1.806.670.846,92	99,08
Rehabilitasi Jaringan Air Minum Desa Aek Nauli II Kec. Sipahutar	196.954.800,00	194.561.897,00	98,79
Rehabilitasi Jaringan Air Minum di Desa Simanampang Kecamatan Pahae Julu	196.954.898,00	196.423.950,00	99,73
Rehabilitasi Sumur Bor di Desa Sipultak Dolok Kecamatan Pagaran	47.596.000,00	47.505.000,00	99,81
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pangurdotan Kecamatan Pahae Julu	695.600.000,00	688.643.999,98	99,00
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sitanggor Kecamatan Muara	686.400.000,00	679.535.999,94	99,00
Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	49.999.800,00	33.230.704,00	66,46
Biaya Umum Pendamping DAK Air Minum	49.999.800,00	33.230.704,00	66,46

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.132.397.600,00	7.127.924.430,00	99,94
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.132.397.600,00	7.127.924.430,00	99,94
<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	129.080.600,00	125.597.080,00	97,30
Biaya Umum Pendamping DAK Sanitasi	99.080.600,00	99.826.938,00	100,75
Biaya Penunjang Kegiatan Sanitasi Pedesaan (SANDES)	30.000.000,00	25.770.142,00	85,90
<i>Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat</i>	7.003.317.000,00	7.002.327.350,00	99,99
BIAYA PENUNJANG DAK SANITASI	348.317.000,00	347.327.350,00	99,72
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK di Desa Manalu Dolok Kec. Parmonangan	332.750.000,00	332.750.000,00	100,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK di Desa Banuaji II Kec. Adiankoting	332.750.000,00	332.750.000,00	100,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK di Desa Hutaraja Kec. Sipoholon	332.750.000,00	332.750.000,00	100,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK di Desa Hutagalung Siwaluompu Kec. Tarutung	332.750.000,00	332.750.000,00	100,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK di Desa Lobu Hole Kec. Siatas Barita	332.750.000,00	332.750.000,00	100,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK di Desa Nahornop Marsada Kec. Pahae Jae	332.750.000,00	332.750.000,00	100,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK di Desa Huta Nagodang Kec. Purbatua	332.750.000,00	332.750.000,00	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK di Desa Dolok Saut Kec. Simangumban	332.750.000,00	332.750.000,00	100,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK di Desa Silantom Jae Kec. Pangaribuan	332.750.000,00	332.750.000,00	100,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK di Desa Sigotom Timur Kec. Pangaribuan	332.750.000,00	332.750.000,00	100,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK di Desa Sabungan Nihuta V Kec. Sipahutar	332.750.000,00	332.750.000,00	100,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK di Desa Onan Runggu III Kec. Sipahutar	332.750.000,00	332.750.000,00	100,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK di Desa Lobu Siregar II Kec. Siborongborong	332.750.000,00	332.750.000,00	100,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK di Desa Lobu Siregar I Kec. Siborongborong	332.750.000,00	332.750.000,00	100,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK di Desa Parik Sabungan Kec. Siborongborong	332.750.000,00	332.750.000,00	100,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK di Desa Banua Luhu Kec. Pagaran	332.750.000,00	332.750.000,00	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK di Desa Parhorboan Kec. Pagaran	332.750.000,00	332.750.000,00	100,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK di Desa Dolok Saribu Kec. Pagaran	332.750.000,00	332.750.000,00	100,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK di Desa Papande Kec. Muara	332.750.000,00	332.750.000,00	100,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK di Desa Sampuran Kec. Muara	332.750.000,00	332.750.000,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	534.938.900,00	532.185.330,00	99,49
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	534.938.900,00	532.185.330,00	99,49
<i>Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan</i>	534.938.900,00	532.185.330,00	99,49
Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Hutagalung Sialuompu Kec. Tarutung	96.996.000,00	96.036.080,00	99,01
Pembangunan Drainase Lingkungan di Desa Tampilan Nauli Kecamatan Sipoholon	96.996.000,00	96.726.050,00	99,72
Pembangunan Drainase Lingkungan di Dusun Hutabaru Desa Banualuhu Kecamatan Pagaran	96.996.000,00	96.712.600,00	99,71
Pembangunan Drainase Lingkungan di Natumingka Desa Garoga Sibargot Kec. Garoga	96.996.000,00	96.792.700,00	99,79

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Pembangunan Drainase di Dusun Pealinta Desa Dolok Saribu Kecamatan Pagaran	146.954.900,00	145.917.900,00	99,29
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.488.433.100,00	1.474.978.100,00	99,10
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.488.433.100,00	1.474.978.100,00	99,10
<i>Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG</i>	116.400.000,00	112.342.100,00	96,51
Biaya Operasional Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG)	116.400.000,00	112.342.100,00	96,51
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.372.033.100,00	1.362.636.000,00	99,32
Penyediaan Jasa Koordinasi Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) dan Standard Satuan Harga Kabupaten	15.000.000,00	11.413.890,00	76,09
Pembangunan Rumah Singgah pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara	196.955.000,00	196.610.340,00	99,83
Pembangunan Gudang Logistik pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara	146.955.000,00	146.085.310,00	99,41
Penataan Halaman Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara	196.955.000,00	195.738.720,00	99,38
Rehabilitasi Gedung Eks Kantor BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	196.955.000,00	196.041.790,00	99,54
Rehabilitasi Sekolah TK Kemala Bayangkhara Tarutung	196.954.900,00	195.349.900,00	99,19
Rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara	47.789.800,00	47.512.100,00	99,42
Lanjutan Rehabilitasi Sekolah TK Kemala Bayangkhara Tarutung	184.733.400,00	184.148.950,00	99,68

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Rehabilitasi Polindes Lumban Sianipar Desa Sitabotabo Toruan Kecamatan Siborongborong	189.735.000,00	189.735.000,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.731.517.365,00	11.341.470.746,00	96,68
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.224.700,00	69.285.400,00	97,28
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	48.548.200,00	47.083.200,00	96,98
Prasurvey pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	36.971.700,00	35.817.100,00	96,88
Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	4.326.500,00	4.149.500,00	95,91
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.600.000,00	1.558.800,00	97,43
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.950.000,00	1.924.350,00	98,68
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.175.000,00	2.134.050,00	98,12
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.525.000,00	1.499.400,00	98,32
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	7.678.500,00	7.207.200,00	93,86
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	14.998.000,00	14.995.000,00	99,98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.206.236.197,00	3.134.023.016,00	97,75
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.995.920.797,00	2.925.212.466,00	97,64
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	199.317.200,00	199.297.200,00	99,99
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	10.998.200,00	9.513.350,00	86,50

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Penyusunan Laporan Keuangan/Aset Akhir Tahun	5.156.100,00	4.607.700,00	89,36
Penyusunan laporan Keuangan Bulanan	5.842.100,00	4.905.650,00	83,97
Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.429.200,00	480.079.806,00	98,49
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.996.500,00	14.840.000,00	98,96
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.768.100,00	33.073.000,00	83,16
Alat Tulis Kantor	39.768.100,00	33.073.000,00	83,16
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.616.500,00	22.537.000,00	99,65
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.605.900,00	31.561.800,00	99,86
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.677.200,00	10.677.200,00	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.160.000,00	11.160.000,00	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	356.605.000,00	356.230.806,00	99,90
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	62.580.000,00	62.540.000,00	99,94
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	294.025.000,00	293.690.806,00	99,89
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	248.015.100,00	243.430.000,00	98,15
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	248.015.100,00	243.430.000,00	98,15
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.518.998.368,00	7.226.779.249,00	96,11
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.950.000,00	4.890.000,00	98,79
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.436.583.568,00	7.149.889.249,00	96,14

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	77.464.800,00	72.000.000,00	92,95
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.613.800,00	187.873.275,00	94,12
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	125.177.600,00	114.550.275,00	91,51
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	54.793.700,00	53.723.000,00	98,05
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	19.642.500,00	19.600.000,00	99,78
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	87.999.800,00	86.709.500,00	98,53
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	37.999.800,00	36.709.500,00	96,60
<i>Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana</i>	37.999.800,00	36.709.500,00	96,60
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
<i>Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	536.999.800,00	438.368.021,00	81,63
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	98.000.000,00	18.686.000,00	19,07
<i>Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</i>	98.000.000,00	18.686.000,00	19,07
Pendamping Program Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Tapanuli Utara	23.000.000,00	18.686.000,00	81,24

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Revisi Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Tapanuli Utara	75.000.000,00	0	0,00
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	438.999.800,00	419.682.021,00	95,60
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	27.999.800,00	25.213.500,00	90,05
Updating Database RTLH di Kabupaten Tapanuli Utara	27.999.800,00	25.213.500,00	90,05
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	411.000.000,00	394.468.521,00	95,98
Biaya Pendamping Pelaksanaan Program BSPS, Koridor dan Homestay di Kabupaten Tapanuli Utara	46.000.000,00	32.914.721,00	71,55
Biaya Pendampingan Kegiatan PKP Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Tapanuli Utara	10.000.000,00	9.450.000,00	94,50
Pembangunan/Rehabilitasi RTLH bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	300.000.000,00	297.500.000,00	99,17
Biaya Pendukung Pelaksanaan RTLH bagi MBR di Kabupaten Tapanuli Utara	55.000.000,00	54.603.800,00	99,28
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.276.784.410,00	6.106.756.735,00	97,29
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	6.276.784.410,00	6.106.756.735,00	97,29
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.480.533.910,00	5.399.941.735,00	98,53
Biaya Pendamping Pelaksanaan Program Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)	39.999.800,00	38.665.800,00	96,66

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Biaya Tim Verifikasi dan Sekretariat PSU di Kabupaten Tapanuli Utara	12.999.900,00	9.463.200,00	72,79
Monitoring dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Tapanuli Utara	772.940.200,00	769.481.700,00	99,55
Pemeliharaan Tugu dan Gapura di Kabupaten Tapanuli Utara	99.988.700,00	95.658.000,00	95,67
Pemeliharaan Lampu Hias	163.192.900,00	162.604.000,00	99,64
Pemeliharaan Lampu Taman dan Lampu Kota	202.625.200,00	189.735.550,00	93,64
Pemeliharaan Rutin TPU Pagar Batu Kec, Sipoholon dan TPU Siarang-arang Kec, Tarutung	29.188.600,00	28.384.500,00	97,25
Pemeliharaan Taman dan Pohon Lindung	397.426.580,00	393.657.680,00	99,05
Pengadaan Bunga untuk Desa Percontohan PKK	68.934.600,00	68.528.850,00	99,41
Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	23.631.630,00	23.610.000,00	99,91
Penyediaan Perlengkapan Kerja dan Operasional	72.546.100,00	62.501.500,00	86,15
Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dolok Ambar Desa Aritonang Kecamatan Muara	96.954.900,00	95.949.800,00	98,96
Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Pargompulan Desa Pohan Tonga Kec. Siborongborong	146.875.700,00	146.723.200,00	99,90
Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Lumban Sibabiat Lobu Siregar 2 kec. Siborongborong	146.875.700,00	146.748.200,00	99,91
Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Lumban Ina-ina Kec. Pagaran	146.875.700,00	146.753.200,00	99,92
Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Hapoltahan Kec. Tarutung	96.916.800,00	96.752.780,00	99,83

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Huta Bulu Desa Dolok Saribu Kec. Pagaran	146.875.800,00	146.769.500,00	99,93
Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun 2 Desa Pariksabungan Kec. Siborongborong	146.875.700,00	146.745.200,00	99,91
Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Desa Parbaju Tonga Kec. Tarutung	96.995.800,00	96.691.800,00	99,69
Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kabupaten Tapanuli Utara	196.955.000,00	195.560.500,00	99,29
Penataan Taman Simp. 3 Sibadak Kec. Sipoholon	97.315.800,00	96.879.400,00	99,55
Pembangunan Jalan Lingkungan di Dusun Lumban Maradang Desa Sosunggulon Kecamatan Tarutung	96.916.700,00	96.536.900,00	99,61
Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Pamunuan ni Babiat Desa Sitampurung Kecamatan Siborongborong	96.916.900,00	96.677.500,00	99,75
Pembangunan Jalan Lingkungan di Jl. Siswa Kecamatan Siborongborong	96.916.900,00	96.861.499,00	99,94
Penataan Lingkungan di Dusun Sibatu batu Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu	146.955.000,00	144.722.620,00	98,48
Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Saroha 2 Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung	96.916.700,00	96.706.350,00	99,78
Pembangunan Jalan Lingkungan di Kompleks Jl. Makmur Kecamatan Siborongborong	96.917.000,00	96.771.000,00	99,85
Rehabilitasi Pansur Umum di Dusun Siparpar Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu	71.995.900,00	71.628.200,00	99,49

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Rehabilitasi Kamar Mandi Umum di Lumban Hariara Dusun Tapian Nauli Desa Hutaginjang Kecamatan Muara	196.955.000,00	194.134.200,00	98,57
Penataan Taman Tugu Maduma Kec. Siborongborong	196.955.000,00	196.743.200,00	99,89
Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Kota Kec. Siborongborong	96.955.000,00	96.853.000,00	99,89
Pembangunan Jalan Lingkungan Di Dusun Sosor Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon	96.917.000,00	97.216.400,00	100,31
Biaya Pendukung Perhelatan F1 Powerboat World Championship di Danau Toba	87.616.200,00	84.667.200,00	96,63
Rehabilitasi Jalan Lingkungan Menuju Tugu Tuan Simare Desa Aritonang Kecamatan Muara	150.000.000,00	144.544.700,00	96,36
Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Sosor Niopan Huta Silalahi Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong	150.000.000,00	144.380.300,00	96,25
Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Sitompul Kecamatan Siatasbarita	150.000.000,00	145.777.807,00	97,19
Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun Pamadang Desa Parbaju Tonga Kecamatan Tarutung	148.609.500,00	147.400.400,00	99,19
Pembangunan Jalan Lingkungan di Gg. Dame Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong	100.000.000,00	96.075.800,00	96,08
Pembangunan Jalan Lingkungan di Jalan Balige Lumban Nainggolan Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong	150.000.000,00	144.380.299,00	96,25
Pemeliharaan Kendaraan Mobil Tangki	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	796.250.500,00	706.815.000,00	88,77
Penyediaan Jasa Administrasi Petugas Taman, LPJU, dan TPU	786.535.000,00	699.515.000,00	88,94

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Penyediaan Jasa Operasional Kebersihan di TPU Pagar Batu Kec, Sipoholon dan TPU Siarang-arang Kec, Tarutung	9.715.500,00	7.300.000,00	75,14
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	176.897.400,00	169.798.700,00	95,99
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	176.897.400,00	169.798.700,00	95,99
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	102.031.500,00	97.849.330,00	95,90
Inventarisasi Tanah di Kabupaten Tapanuli Utara	102.031.500,00	97.849.330,00	95,90
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	74.865.900,00	71.949.370,00	96,10
Mediasi Sengketa Tanah di Kabupaten Tapanuli Utara	74.865.900,00	71.949.370,00	96,10
Total	31.053.210.006,00	30.304.045.775,00	97,59

Untuk mengetahui tingkat capaian efisiensi anggaran secara keseluruhan dapat diketahui pada perhitungan berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Capaian Efisiensi Anggaran} &= \text{Capaian Kinerja} - \text{Capaian Anggaran} \\
 &= 98,62\% - 97,59\% \\
 &= 1,03\%
 \end{aligned}$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian efisiensi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara termasuk dalam kategori **sangat efisien**.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Laporan ini bermaksud menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis. Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 ini menggambarkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dengan 11 (Sebelas) indikator kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dengan capaian sebesar **98,62 % dengan kategori capaian sangat tinggi**, yang diperoleh melalui pengukuran terhadap indikator sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) indikator sasaran atau 91% kategori capaian sangat tinggi
- 1 (satu) indikator sasaran atau 9% kategori capaian tinggi

Dalam pengukuran kinerja tahun 2023 masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang masih bersifat sementara (angka sementara) yakni *indikator Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat*. Penggunaan angka sementara ini dimaksudkan agar mempermudah penghitungan rata-rata capaian kinerja dengan memperhitungkan trend capaian indikator kinerja pada tahun sebelumnya.

Secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara telah menerapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun implementasi akuntabilitas kinerja masih terdapat banyak kelemahan. Perumusan tujuan dan sasaran strategis belum ditetapkan dengan baik yang mempengaruhi perhitungan persentasi capaian kinerja. Target kinerja belum ditetapkan dengan baik, sehingga sulit dicapai apabila melihat trend realisasi angka rata-rata capaian tahun sebelumnya.

Penyusunan laporan kinerja tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan umpan balik mendorong perbaikan kinerja pada tahun 2024 dan pada tahun - tahun berikutnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

BUDIMAN GULTOM, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741014200003 1 002

